

JenisBerkas	: Pers Rilis	No. Arsip	: PR.Maret/02
Judul	: APBD Riau 2021	Tanggal	: 1 Maret 2021
Sub Judul	: <b>Biayai Bukan Kewajiban, Abai Dengan Prioritas</b>	Tahun	: 2021
		Penulis	: *FITRA RIAU*

## **APBD Riau 2021** **Biayai Bukan Kewajiban, Abai Dengan Prioritas**

Postur belanja daerah Provinsi Riau belum menunjukkan perubahan dari tahun ke tahun. Lagi-lagi masih terjadi alokasi anggaran dengan jumlah besar untuk membiayai yang bukan kewajiban dan prioritas pembangunan daerah. Sementara, yang seharusnya menjadi prioritas pembangunan ditengah situasi Covid19 dan untuk mencapai visi dan misi justru terabaikan dan minim alokasi anggaran.

Tahun 2021, pemerintah provinsi Riau melalui APBD mengalokasikan sebesar **Rp. 213, 5 Milyar** untuk membiayai program pembangunan gedung kantor. Anggaran tersebut diperuntukkan untuk membiayai hibah kepada pemerintah pusat (Gedung Korem) sebesar **Rp. 98,4 Milyar**, pembangunan gedung rumah ibadah sebesar **Rp. 64 Milyar**, dan **Rp. 32,2 Milyar** untuk pembangunan gedung kantor pemerintah lainnya.

“Pandemi covid19 berdampak pada kondisi ekonomi dan tidak stabilnya kondisi keuangan daerah yang mengharuskan melakukan efektifitas dan efisiensi anggaran. Namun situasi itu tidak tercermin dalam APBD Provinsi Riau 2021”, Jelas Tarmizi, Deputy Koordinator Fitra Riau.

Alokasi anggaran yang tidak prioritas itu juga kontraproduktif dengan pernyataan -pernyataan bahwa pembangunan infrastruktur pelayanan dasar publik tidak bisa dibangun secara maksimal karena minim anggaran. Bahkan pemerintah provinsi Riau berencana mengajukan hutang untuk membiayai infrastruktur. Namun, justru dengan keuangan yang ada pemerintah menggelontorkan anggaran besar untuk membiayai yang bukan kewajiban dan bukan prioritas daerah.

“Seharusnya Provinsi Riau yang memperjuangkan tambahan pendanaan kepusat melalui permintaan hibah dari pemerintah pusat, bukan memberi hibah kepada pemerintah pusat”, tegasnya.

Secara aturan, APBD disusun berdasarkan mekanisme perencanaan pembangunan daerah. Tentu seluruh isinya rencana kerja daerah adalah agenda strategis yang diusulkan melakukan mekanisme musyawarah rencana pembangunan. Selain itu juga rencana kerja pembangunan direncanakan dengan pertimbangan permasalahan – permasalahan daerah.

“Yang menjadi pertanyaan, pembangunan gedung korem (hibah pemerintah pusat) itu usulan dari masyarakat mana?. Lalu anggaran itu dialokasikan menjawab permasalahan daerah yang mana pula?”. Jelas Tarmizi.

### **Abai Prioritas**

Anggaran yang dialokasikan untuk tiga pembangunan itu, hampir setengah dari belanja yang dialokasikan untuk membiayai pembangunan jalan dan jembatan di Riau. Tahun 2021 untuk pembangunan jalan dan jembatan dilaokasikan sebesar **Rp. 503 Milyar**. Alokasi anggaran itu jauh lebih rendah dari yang dimandatkan dalam RMPJD Riau 2019-2024 yang seharusnya mengalokasikan **Rp. 875 Milyar** setiap tahun untuk meningkatkan infrastruktur yang menjadi kewenangan provinsi. Padahal infrastruktur jalan dan jembatan adalah prioritas pembangunan daerah.

Prioritas yang diabaikan lainnya adalah pembangunan infrastruktur untuk menunjang ketahanan pangan (swasembada pangan) yang menjadi prioritas daerah. Salah satu yang menjadi prioritas adalah meningkatkan saluran irigasi pertanian tanaman pangan. Sementara dalam APBD hanya dilokasi sebesar **Rp. 11, 6 Milyar**. Padahal petani sangat membutuhkan dukungan tersebut.

Aspek yang lainnya, adalah misi Riau Hijau yang digadang-gadangkan dan menjadi prioritas pemerintah daerah provinsi Riau. Salah satu tumpuan untuk mencapai misi itu adalah pada urusan lingkungan hidup dan kehutanan. Justru melihat alokasi anggaran yang diposkan pada Dinas LHK Riau menunjukkan tidak ada perubahan dari tahun ketahun, malah justru menurun.

Alokasi anggaran untuk DLHK, 2021 sebesar **Rp. 145,7 Milyar**, dari total alokasi anggaran tersebut sebesar **Rp. 128,2 (88%)** dialokasikan untuk biaya penunjang operasi (gaji, dan biaya rutin). Artinya hanya **Rp. 17,4 Milyar (12%)** anggaran di DLHK yang dapat digunakan untuk belanja program dibidang LH dan Kehutanan, Bagaimana Riau Hijau akan tercapai?.

Prirotas lainnya yang diabaikan juga terkait dengan penanganan covid19. Khususnya dalam penanganan dampak Sosial dan Pemulihan Ekonomi nasional dan daerah. Di APBD 2021, justru tidak tergambar kebijakan anggaran untuk merespon covid19. Padahal covid19 belum berakhir dan mestinya harus menjadi perhatian pemerintah.

### **Batalkan dan Realokasi**

Mumpung masih cukup waktu, bagi Gubernur Riau untuk membatalkan anggaran tersebut dan merealokasikan untuk anggaran yang menjadi prioritas daerah. Seperti menambah untuk belanja infrasturktur, Riau Hijau dan untuk penanganan covid19. Gubernur harus segera memerintahkan kepada TAPD untuk merevisi, tentu masih banyak anggaran – anggaran yang tidak penting lainnya dalam APBD 2021.

Ini juga menjadi catatan bagi Menteri dalam Negeri, yang melakukan review atas rancangan dokumen APBD. Yang seharusnya lebih jeli terhadap rencana anggaran daerah yang tidak penting dan bukan menjadi prioritas pembangunan daerah. Untuk itu Mendagri harus segera mengintruksikan kepada pemerintah Riau untuk melakukan revisi APBD 2021 secara menyeluruh.

Pekanbaru, 01 Maret 2021

Contact Person:

Tarmizi : +62 852-7817-5515

Taufik : +62 853-6343-0444